

Meningkatkan Daya Saing Produk Hortikultura Indonesia*

Fahrurrozi

*Dosen Mata Kuliah Hortikultura dan Produksi Tanaman Sayuran pada Program Studi Agroekoteknologi,
Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu*

email: fahrurrozi@unib.ac.id

Pengantar

Secara umum, cakupan bisnis hortikultura meliputi bagaimana memproduksi tanaman sayuran (*olericulture*), tanaman buah-buahan (*pomologi*), tanaman hias (*floriculture*), dan pengelolaan rumput untuk taman (*turf management*) secara berkelanjutan (Bautistuta, et al., 1983; Preece and Read., 1993). Untuk berkelanjutan, maka sistem produksi harus terintegral dalam suatu sistem agribisnis, yang meliputi sub-sistem industri hulu, sub-sistem produksi, sub-sistem pengolahan produk, sub-sistem pemasaran, dan sub-sistem penunjang agribisnis. Agar berkelanjutan, maka sistem agribisnis harus memenuhi prinsip-prinsip ramah lingkungan (*environmentally/ecologically sounds*), menguntungkan (*economically sounds*), tidak bertentangan dengan norma-norma sosial (*socially just*), manusiawi (*humane*), dan mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan (*adaptable*) (Reijnjes dkk., 1992). Kegiatan produksi tanaman dan tumbuhan yang lain dan termasuk dalam agribisnis hortikultura adalah produksi tanaman anggur (*viticulture*), industri rangkaian bunga segar (*floristry*), pembibitan tanaman (*nursery production*), manajemen tanaman untuk taman (*landscape horticulture*), dan bahkan apikultura atau budidaya lebah (*apiary*). Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2010, tentang Hortikultura, yang dimaksud dengan tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

Keberhasilan agribisnis tanaman hortikultura membutuhkan pengetahuan tentang ciri produk hortikultura, karena akan menentukan keputusan bisnis yang akan diambil oleh pelaku agribisnis hortikultura, baik petani produsen, maupun pihak lain yang bergerak dalam bidang hortikultura. Secara umum, ciri produk hortikultura adalah (1) nilai ekonomis tergantung kesegarannya, (2) produknya mudah rusak, (3) produknya meruah dan musiman, (4) bukan merupakan sumber karbohidrat utama, tetapi merupakan sumber vitamin, serat dan mineral, dan (5) sangat intensif dalam perawatan, baik dalam proses produksi, maupun dalam penanganannya. Sifat dan karakteristik ini juga mempengaruhi kebijakan penyediaan konsumsi masyarakat terhadap produk hortikultura oleh pemerintah.

Tulisan singkat ini akan membahas tentang bagaimana gambaran agribisnis hortikultura Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan tanaman sayuran dan buah-buahan. Kedua produk ini merupakan produk yang banyak melibatkan masyarakat, baik secara sosial, maupun secara ekonomis, dan merupakan sumber nutrisi dalam menunjang kesehatan masyarakat. Fokus tulisan ini secara singkat juga akan menjelaskan tentang kebijakan impor pemerintah Indonesia dan pengaruhnya terhadap agribisnis sayuran dan buah-buahan yang dilakukan masyarakat Indonesia. Penulis juga berusaha menyajikan beberapa solusi yang diperlukan agar produksi sayuran dan buah-buahan dalam negeri dapat menguasai pasar dalam negeri.

* Disampaikan dalam Seminar Nasional Ikatan Mahasiswa Muslim Pertanian Indonesia (IMMPERTI) 2013, tanggal 31 Maret 2013 di Universitas Bengkulu

Standard dan tingkat konsumsi sayuran dan buah masyarakat Indonesia

Rekomendasi Food and Agriculture Organization (FAO) untuk konsumsi sayuran per kapita agar dapat hidup sehat adalah 73 kg/tahun, sedangkan untuk buah-buahan adalah 65 kg/tahun. Laporan Ditjen Hortikultura (2010) menunjukkan bahwa tingkat konsumsi sayuran masyarakat Indonesia tahun 2009 adalah 40,66 kg/kapita/tahun dan tanaman buah-buahan sebesar 32,59 kg/kapita/tahun. Angka ini jelas menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan sesuai standar yang dibutuhkan agar dapat hidup sehat. Angka ini juga memberikan makna bahwa upaya untuk memenuhi standar konsumsi sayuran dan buah-buahan yang sehat merupakan peluang pasar bagi produk sayuran dan buah domestik.

Potret umum petani hortikultura Indonesia

Dalam sistem agribisnis hortikultura, petani Indonesia kebanyakan hanya terlibat dalam proses produksi tanaman di lahan. Hal ini sangat dapat dimaklumi, karena rata-rata *schooling years* masyarakat Indonesia, termasuk para petani ini, hanya 7,2 tahun. Dengan pengalaman belajar seperti ini, memang rata-rata kegiatan ekonomis yang mungkin mereka geluti hanya pada sub-sistem produksi tanaman di lahan. Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan lahan dan modal yang dimiliki petani, produsen produk hortikultura. Dengan ketiga persoalan tersebut saja tidak banyak petani yang mampu masuk ke sub-sistem pengolahan hasil dan apalagi ke sub-sistem pemasaran. Persoalan lain yang dihadapi petani adalah dinamika perubahan iklim, lahan-lahan yang bergelombang dan terpisah oleh laut, dan infrastruktur transportasi yang kurang memadai, serta tidak adanya asosiasi produsen komoditi tertentu untuk meningkatkan posisi tawar petani.

Kondisi tersebut mendorong petani sayuran dan buah-buahan menjadi tergantung dengan pemilik modal, baik tengkulak maupun industri pengolahan, serta kebijakan dan keberpihakan pemerintah. Ketidakmampuan petani dalam menghadapi tengkulak dan pemilik modal menjadikan pemerintah sebagai satu-satunya harapan untuk meningkatkan produktivitas mereka.

Namun demikian, dengan segala keterbatasan dan persoalan yang dihadapi, petani sayuran dan buah-buahan ternyata mampu memproduksi komoditas tersebut dalam jumlah yang sangat memadai. Data dari Ditjen Hortikultura (2010) menunjukkan bahwa ketersediaan tanaman sayuran dan buah-buahan, hasil produksi dalam negeri, setiap tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2009, ketersediaan produk tanaman sayuran Indonesia sudah mencapai 77,03 kg/kapita/tahun, dan tanaman buah-buahan sudah mencapai 42,26 kg/kapita/tahun. Artinya, kemampuan produksi petani hortikultura saat ini mampu untuk memenuhi kebutuhan atau tingkat konsumsi sayuran dan buah masyarakat Indonesia yang masih mengkonsumsi sayuran 40,66 kg/kapita/tahun dan buah-buahan sebesar 32,59 kg/kapita/tahun. Kelebihan nilai produksi tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya banyak produk petani yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, baik karena lemahnya sistem penyimpanan dan pengangkutan produk, maupun karena adanya ekspor sayuran dan buah.

Nilai Impor Produk Sayuran dan Buah Indonesia

Lalu mengapa sekarang yang terjadi justru impor produk hortikultura yang dianggap menjadi kambing hitam bagi melambungnya sejumlah harga komoditas hortikultura?. Jika data ketersediaan sayuran (77,03 kg/kapita/tahun) dan buah (42,26 kg/kapita/tahun) benar, maka sebenarnya Indonesia tidak perlu terlalu banyak mengimpor sayur dan buah untuk memenuhi permintaan konsumsi dalam negeri. Kalaupun harus mengimpor, sesungguhnya yang diimpor adalah sayuran dan buah yang memang secara agroekologis tidak dapat tumbuh dengan baik di Indonesia, atau pada saat pasokan dari petani lokal rendah. Tabel 1 menunjukkan besarnya impor beberapa komoditas hortikultura selama periode 2010-2012.

Tabel 1. Nilai Impor sejumlah komoditas Hortikultura (Juta dollar AS)

Komoditas	2010	2011	2012*
Bawang merah segar	33,86	75,52	26,64
Bawang putih segar	245,96	272,81	52,77
Bawang bombay segar	22,47	32,06	5,16
Kentang segar	14,59	46,41	6,72
Kubis/kol segar atau dingin	0,65	1,39	0,93
Cabe segar	1,45	6,93	0,58
Mangga	0,81	0,80	0,50
Jeruk segar	168,97	192,31	104,5
Anggur segar	81,27	113,11	26,70
Apel segar	168,08	186,40	34,18
Pir dan Kwini	87,83	106,75	23,58
Pisang segar	1,56	0,85	0,33
Tanaman anggrek	0,001	0,001	0,017

* Data Triwulan I, Sumber : Litbang Kompas/GL dari Kementerian Pertanian, Kompas 21 Februari 2012

Sebenarnya yang terjadi adalah impor beberapa produk pertanian (yang resmi) jauh melebihi kuota yang ditetapkan. Hal ini terjadi melalui mekanisme maraknya penyelundupan produk sayuran dan buah. Sebenarnya, mekanisme impor produk hortikultura, termasuk sayuran dan buah-buahan sebenarnya sudah diatur setiap tahun oleh pemerintah, dan bahkan perusahaan yang diberikan izin untuk mengimpor juga sudah ditetapkan, termasuk kuota impor yang diperbolehkan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun

2013 sudah diatur bahwa izin impor dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Pertanian.

Kebijakan impor produk hortikultura Indonesia saat ini paling tidak (1) menyebabkan lumpuhnya aktivitas agribisnis hortikultura pada sub-sistem industri hulu dan sub-sistem produksi, (2) menimbulkan kerugian massal, karena pada kedua sub-sistem ini, jumlah masyarakat (petani) yang terlibat sangat tinggi, baik sebagai buruh, pemilik dan pelaku, dan (3) menurunkan harga komoditas sayuran produksi domestik.

Kebijakan ini juga memberikan manfaat kepada importir saja. Dapat dibayangkan jika seorang importir diberikan kuota impor sebanyak 10.000 ton, dan lalu ia mampu memperoleh keuntungan Rp. 2.500,- per kilo gram, maka pengusaha tersebut sudah untung Rp. 25 milyar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan impor tidak mampu membantu meningkatkan pendapatan petani, tetapi hanya memberikan keuntungan kepada importir saja.

Penguatan petani hortikultura

Dari berbagai gambaran di atas, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa secara agronomis petani hortikultura Indonesia mampu menjalankan fungsinya sebagai produsen. Hal ini paling tidak sudah dibuktikan dengan kemampuan petani hortikultura untuk menyediakan sayuran sebesar 77,03 kg/kapita/tahun dan buah sebesar 42,26 kg/kapita/tahun. Tentu saja hal ini merupakan fungsi dari pengalaman dan pengetahuan petani dan interaksinya dengan kondisi agroekologis Indonesia. Peningkatan daya saing produk hortikultura Indonesia, sayur dan buah, harus terus dilakukan secara menyeluruh dengan memperbaiki kinerja petani, memperbaiki komitmen pemerintah, dan meningkatkan partisipasi perusahaan dan industri yang bergerak dalam pemasaran dan pengolahan sayur dan buah. Meskipun luas kepemilikan lahan petani tidak dapat ditingkatkan, namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar petani hortikultura dapat menikmati hasil pertaniannya secara ekonomis, **antara lain :**

1. Meningkatkan akses petani produsen ke pasar dan industri pengolahan, baik berupa jalan, alat dan sarana transportasi. Secara hukum juga dapat dilakukan dengan menindak tegas keberadaan tengkulak, dan pelaku praktek ijon yang secara terselubung sering dilakukan oleh berbagai perusahaan yang bergerak dalam penyediaan bibit, pupuk dan sarana produksi lainnya.
2. Mendorong untuk terbentuknya wilayah-wilayah produksi untuk masing-masing komoditi, sehingga tidak terjadi penumpukan produk pada kawasan tertentu, tetapi langka di tempat lain.
3. Mengembangkan sistem *participatory plant breeding* berbasis komunitas untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap benih yang berkualitas dan harga yang terjangkau.
4. Mendorong terbentuknya asosiasi produsen setiap komoditas yang berfungsi untuk memperjuangkan posisi tawar mereka dalam mekanisme pasar yang ada. Asosiasi ini harus didorong untuk muncul tumbuh dari petani yang harus dijauhkan dari berbagai kepentingan politik transaksional.

5. Mengembangkan sistim penyimpanan produk yang tidak dikuasai oleh pengusaha, sehingga petani tetap mampu mensuplai produk pada saat produk tidak sedang panen.
6. Optimalisasi pemanfaatan terminal agribisnis atau sub-terminal agribisnis yang sudah banyak dikembangkan di sentra-sentra produksi tanaman hortikultura.
7. Meningkatkan peran penyuluh pertanian menjadi fasilitator pemasaran. Penyuluh pertanian tidak boleh hanya berpengetahuan dalam bidang produksi tanaman saja, tetapi juga harus mampu menjadi perpanjangan tangan petani untuk mendapatkan akses sarana produksi yang murah dan berkualitas. Penyuluh pertanian bukannya malah menjadi salesmen perusahaan-perusahaan benih, pestisida, pupuk atau alat dan mesin pertanian. Penyuluh pertanian harus mampu memberikan bimbingan secara integral kepada petani dalam sistem agribisnis, dari hulu hingga hilir, termasuk pendampingan untuk memastikan hak-hak petani tidak terabaikan.
8. Meningkatkan kemampuan petani untuk mampu bersaing dengan produk-produk impor. Konsekwensi dari berbagai kesepakatan dagang internasional, pemerintah Indonesia sudah tidak boleh melarang ekspor negara lain ke Indonesia. Yang dapat dilakukan adalah meningkatkan daya saing produk domestik terhadap produk impor, menekan jumlah importir, menekan kuota impor berbagai produk hortikultura.
9. Mendorong tumbuhnya industri pengolahan produk-produk hortikultura, sehingga tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk dan mampu menampung produksi yang ada, tetapi juga mampu menyerap lapangan kerja baru dan bahkan dapat menggerakkan kegiatan penelitian dan pengembangan produk di Indonesia.
10. Menghukum berat dan tegas para penyelundup dan semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut
11. Mendorong peningkatan konsumsi sayuran dan buah masyarakat Indonesia per kapita per tahun, sehingga produk hortikultura yang dihasilkan petani dapat terserap pasar yang dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada petani. Hal ini juga dapat meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat dan sekaligus menekan konsumsi beras masyarakat Indonesia yang sudah mencapai 139 kg/kapita/tahun.
12. Pemerintah harus memfasilitasi dan melindungi petani dalam kegiatan ekspor produk sayuran dan buah. Jangan biarkan petani menjadi objek tengkulak atau pengusaha eksportir yang tidak mau berbagi resiko dengan petani.
13. Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah. Pembangunan Indonesia yang menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia harus dirubah. Munculnya kawasan ekonomi baru akan meningkatkan jumlah penduduk di kawasan ekonomi baru tersebut. Hal ini akan mempersingkat rantai pemasaran sayur dan buah, sehingga nilai ekonomis yang dapat dinikmati petani meningkat.
14. Meningkatkan subsidi secara tidak langsung kepada petani melalui penyediaan benih dan pupuk yang murah, memperbaiki infrastruktur dan sistem transportasi yang mampu mempercepat sampainya sayuran dan buah dari petani ke konsumen. Subsidi BBM yang mencapai Rp. 240 triliun pertahun (Kompas, 21/03/2013) harus dicabut dan dialihkan untuk program peningkatan daya saing petani Indonesia umumnya, termasuk petani hortikultura. Subsidi pemerintah terhadap BBM ini sangat tinggi. Sebagai gambaran, untuk membangun jalan trans Sumatera sepanjang 2.700 km 'hanya' membutuhkan Rp. 99,88 triliun, untuk perbaikan dan peningkatan

enam pelabuhan utama dan pelabuhan pendukung lainnya di Indonesia 'hanya' membutuhkan dana sebesar Rp. 14,87 triliun.

15. Mari kita bersama-sama memberantas korupsi di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tolak semua bentuk korupsi. Lakukan di semua lini kehidupan, baik sebagai anggota masyarakat, pengusaha, politisi, maupun sebagai aparatur pemerintahan. Korupsi itu tidak hanya dosa yang harus dipertanggungjawabkan, tetapi juga dapat menyengsarakan banyak orang, dan bahkan dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peradaban manusia itu sendiri.

Penutup

Meningkatkan kemampuan petani hortikultura Indonesia untuk menghasilkan produk yang berdaya saing dengan produk impor bukan hanya merupakan tanggungjawab petani, tetapi merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat Indonesia secara umum. Petani Indonesia harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Petani Indonesia harus difasilitasi dan ditingkatkan kemampuannya untuk dapat menghasilkan produk yang mampu menyediakan sumber nutrisi untuk bangsanya dan produk yang mampu bersaing dengan produk impor.

Selamat berseminar, semoga kegiatan seperti ini memberikan pengalaman baru dalam meningkatkan komitmen generasi muda untuk meningkatkan kemandirian, ketangguhan kedaulatan dan daya saing pertanian Indonesia.

Bengkulu, 30 Maret 2013

Pustaka

Bautistuta, O.k., H.L. Valmayor, P. C. Tabora Jr, dan R. R. C. Espino. 1983. Introduction to Tropical Horticulture. Dept. of Horticulture, University of the Philippines at Los Banos.

Direktorat Jenderal Hortikultura. 2010. Cetak Biru Pengembangan Hortikultura Tahun 2011-2015. Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementrian Pertanian RI. Jakarta

Harian Kompas, tanggal 21 Februari 2013.

Harian Kompas, tanggal 21 Maret 2013

Preece, J,E. and P.E. Read. 1993. The biology of Horticulture. An Introduction Textbook. Wiley. University of Michigan.

Reijntjes, C, B. Haverforcht, dan A. Waters-Bater. 11992. Farming for the Future. An Introduction to Low-external Input and Sustainable Agriculture. The Macmillan Press Ltd.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2010, tentang Hortikultura. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5170.

